

"Wahai yang berjalan,
disana tak ada jalan. Hanya dengan mulai
berjalanlah kita membuka jalan" - [Antonio Machado]

Jurnal Anti Otoritarian
#4 - Oktober 2009
Edisi Khusus | Solidaritas Untuk Perjuangan Petani Takalar

KONTINUM

Panjang Umur Petani Takalar!

KONTINUM
otonom - antihirarki

TIM REDAKSI
Bahar Dg Lontang
Maximus Celeste
Alisa Dita Manimpian
Nelson Al Qasy - Ishmael Yahalah
Josh Al Diwani - Poldari Kabul

Jurnal ini diterbitkan oleh Kontinum, kolektif anti-otoritarian non-hirarkis yang dioperasikan oleh beberapa sel dan individu yang masing-masing bertindak secara independen dan terdesentralisasi, dalam tujuan mencapai dunia yang lebih bebas dan indah.

Lewat jurnal ini, Kontinum menyapa dan ingin menjalin pertemanan serta berbagi wacana, gagasan dan kerjasama yang solid dengan berbagai pihak, dalam rangka memperkuat gerakan melawan sistem dominan yang eksis bersama Perbudakan modernnya.

Salam !

kunjungi website kami :
www.kontinum.org

Redaksioner

Sebuah gerimis kecil telah menjemput nomor ini. Tandanya, jurnal ini akan dibaca tepat di permulaan musim penghujan. Kemarau segera beranjak. Mungkin juga tidak, karena El Nino dan La Nina masih bermain di pekarangan. Perubahan di stratosfer ini telah menyulut berbagai kegilaan. Tetapi selalu ada waktu untuk berdansa dan bernyanyi di hadapan api unggun.

Nomor kali ini kami dedikasikan kepada warga Polongbangkeng, Takalar. Kebangkitan perjuangan mereka adalah kelanjutan dari sejarah panjang 27 tahun lebih, mengorganisir diri dengan taktik aksi langsung, sabotase, dengan pola-pola gerakan dimana kepemimpinan formal absen dan tidak eksis selama pergolakan. Meskipun pada akhirnya, swa-inisiatif dan swa-aktifitas petani dipukul mundur oleh rekuperasi dan injeksi taktik yang memalukan : berdamai dan berunding dengan penindasnya. Sebuah tawaran taktik yang terbukti tidak menghasilkan kedaulatan dan harga diri apapun selain ilusi "kemenangan-kemenangan kecil" ala kelas menengah yang seharga dengan opini-opini banal di media massa, yang berkomentar tentang aksi langsung petani.

Kami menyusun sebuah reportase atas rentangan panjang perjuangan petani. Di sela-sela aksi petani, kami menyempatkan berdialog tentang apa yang terjadi, apa yang mereka pahami. Kami membangun sebuah analisa mengenai relasi tatanan dunia yang semakin absurd ini dengan apa yang terjadi di Takalar. Kami mencoba melampaui standarisasi politik dan ekonomi. Karena semenjak semakin banalnya gagasan neoliberalisme, terutama pendangkalan akibat pengarusutamaannya di media massa berdasarkan kepentingan pemilu kemarin, kita tak bisa memungkiri dibutuhkan sebuah loncatan melampaui semua analisa atas apa yang terjadi di kehidupan kita ini.

Saat jurnal ini disusun, petani Takalar masih belum beranjak dari posisi awalnya. Meski negara dan kapital terus melakukan teror dan intimidasi, demi sirkulasi ekonomi dan stabilitas. Namun kita semua tahu, di antara bentangan langit yang cerah, akan ada pelangi yang menjemput sesaat setelah hujan reda.

Panjang umur aksi langsung merebut tanah dan kehidupan!

Panjang umur pergolakan melawan negara dan kapital!

Panjang umur perjuangan petani Takalar!

Panjang umur gerakan otonom anti-hirarki di seluruh dunia!



WAWANCARA DENGAN PETANI POLONGBANGKENG, TAKALAR

"PEMIMPIN MEMBUAT KAMI LEMAH"

Wawancara partisipan Kontinum *kepada* Sapri Dg Serang *[warga Polombangkeng, Takalar] satu dari petani yang berjuang melawan PTPN XIV.*

Wawancara dilakukan di sela-sela aksi menghalau PTPN XIV keluar dari tanah warga, 19 Juli 2009.

Di tengah pembicaraan, wawancara terputus karena kondisi memanas dan memaksa petani kembali bergerak.

Bisa diceritakan bagaimana kejadian sebelum PTPN masuk?

Anjo pertamata nisuro annarima, tenapa rong nicuriga. Attungku nipatarimai doe' nakana Karaeng Sibali siagangi Karaeng Temba ruang puloji allima taung, jari punna ganna' ruang pulo allima taung nipoterangi pole punna teamaki. Minka punna ero'ijaki' nibayaraki poeng ammotere'. Jari anne taunga liwa'mi tallu taung allalona anjo ruang puloa allima taung, ruang pulomi assagangtuju taung. Attayangki pangnganu battu ri boska minka tenaja anne mae angnganuki, jari iyya tommi hak'ta ngapa nanrapi'mo ruang pulo allima taung natenaja na anuki'. Nisaremaki' sedeng doe', jari ero' tommaki. Punna teaki annarima na jakkalakki'...kammanjo!

Waktu pertama kali menerima, kita belum curiga. Pada saat saya menerima uang Karaeng Sibali dan Karaeng Temba bilang kalau hanya dua puluh lima tahun, ketika sudah sampai dua puluh lima tahun dikembalikan kalau sudah tidak mau lagi. Tapi kalau masih mau akan dibayar kembali. Tahun ini sudah lewat tiga tahun dari dua puluh lima tahun, sudah dua puluh delapan tahun. Kami menunggu sesuatu dari bos tapi tidak ada apa-apa, kenapa sudah sampai dua puluh lima tahun tapi hak kami belum dikembalikan. Kemudian diberi lagi uang, jadi kami mau saja. Karena kalau tidak mau menerima kami ditangkap...begitu!

Bagaimana bentuk perjanjian dengan pihak PTPN?

Punna narapi'mo ruang pulo allima taung na tena nannganu, tena nibayara' bulangang allei ammotere' buttanu. Ka anne alliwa'mi ruang pulo allima taung, jari ero'mi ni alle...

Kalau sudah sampai dua puluh lima tahun terus tidak dibayarkan lagi, tanahnya boleh diambil kembali. Nah, sekarang sudah lewat dari dua puluh lima tahun, makanya mau diambil...

Waktu itu anda langsung menerima saja, ketika tanahnya mau dikontrak ?

Tena na langsung nitarima, punna teaki' antarimai nikalarroiki', nikanaki PKI! Nipakkanaiki' tena situju pembangunanga, jari malla'-malla'ki. Anjo bura'-bura'nea nitamba'-tambaki punna tea annarima riolo...

Kami tidak langsung menerima perjanjian itu, tapi kalau tidak menerima kami dimarahi, dituduh PKI! Dikatakan menolak pembangunan, makanya kami takut. Dulu para lelaki dipukuli kalau tidak mau menerima...

Ada yang ditangkap? Terus bagaimana caranya?

Niba'ji punna tea annarima, ni jakkalaki poeng. Anjo bura'nea punna tea annarima, nia' battu ri balla nampa nipanaiki ri otoa a'lampa angnganre ri warunga nakana nia acara. Punna lekba'mi ammotere'maki, ternyata lekba'mi ni lamungi. Kammanjo carana riolo...Ka anjo riolo sistemna kakaraengang/kerajaan, tena aturan hukum undang-undang, nakanamo Karaeng Temba siagang Karaeng sibali teami niakki 'hitam diatas putih' ka nia'ja, punna matema anjarimi hakna patanna tanah. Mingka ka anne matemi Karaeng Sibali siagang Karaeng Temba jari iyaminjo niboya ngasengmi hakta sa'genna kamma-kammanne.

Dipukul kalau tidak mau menerima, ada juga ditangkap. Untuk para lelaki yang tidak mau menerima, ada mobil yang datang ke rumah kemudian mereka dibawa pergi makan di warung, katanya ada acara. Kalau sudah makan, pulang. Ternyata sepeninggal mereka ke warung tanahnya sudah ditanami. Begitu dulu caranya, karena dulu adalah sistem kerajaan, tidak ada aturan undang-undang. Karaeng Temba dan Karaeng Sibali tidak perlu ada 'hitam di atas putih' karena kami ada sebagai saksi. Kalau saya meninggal itu menjadi hak pemilik tanah. Tetapi sekarang Karaeng Sibali dan Karaeng Temba sudah meninggal, makanya kami mencoba mencari sampai sekarang.

Setelah itu, tanahnya sudah bisa diambil kembali?

Nampa sipa'gadang, tenapa nigappa ngasengi. Kira-kira nampa 75%, nia' inja 25% niperjuangkan. Jari punna assulu' massaya nipakkanaiki anrampasa' ka anjo sura' niaka teai ilalang arengta, teai hak milikta.

Baru sebagian, belum diperoleh semuanya. Kira-kira baru sekitar 75%, masih ada sekitar 25% yang diperjuangkan. Kalau masyarakat keluar, dikatakan merampas karena di dalam surat itu bukan atas nama masyarakat, bukan hak milik kami.

Jadi bagaimana tanggapannya pemerintah, apakah pemerintah membantu atau bagaimana?

Tena pammarenta ambantuki riolo sa'genta kamma-kammanne, ka tena nakkulle nibanta pammarenta ka iya pata anjo PTPN. Annemi susana sa'genna kamma-kammanne tena pammarenta ammenteng rigatte.

Tidak ada pemerintah yang membantu dari dulu sampai sekarang, karena pemerintah yang punya PTPN makanya tidak bisa dibantah. Inilah susahnya, sampai saat ini tidak ada pemerintah yang berpihak kepada kami.

Bagaimana bentuk koordinasi petani disini karena ada banyak desa?

Tena pemimpin! Jari punna a'jappamaki nia tau ancini'ki nikio'mi mange akkumpulu'. Tena nikana pemimpin, ka massing-massing nia' tanana jari punna nigappami ka teai gatte ampatangi. Untuk apa nipimpin punna nia' ngasengji tanata, jari tena nia' pemimpin! Ka punna nia' pemimpin nampa ni jakkala' biasai lammai taua, mingka punna tenaja ka akkullei niperjuangkan turus. Massing-massing paranta anngerangi kalenta.

Tidak ada pemimpin! Ketika berjalan kemudian ada yang melihat, kami memanggilnya untuk bergabung. Tidak ada yang namanya pemimpin, karena masing-masing memiliki tanah jadi kalau sudah di dapat bukan kami yang mengambilnya. Untuk apa ada pemimpin karena kita semua punya tanah, karena kalau ada pemimpin biasanya ditangkap dan membuat kami lemah. Tetapi kalau tidak ada pemimpin bisa melanjutkan perjuangan. Masing-masing membawa dirinya.

[*Wawancara terputus karena aksi penghadangan kembali dimulai*]

kronik perjuangan **petani takalar**

Makassar
Takalar

>> 1960
Warga mulai bermukim dan mengolah lahan.

> 1974
Informasi mengenai proyek perkebunan tebu mulai merebak di masyarakat.

>> 1978
PT. Madu Baru, perusahaan agri-bisnis milik Hamengkubuwono mulai masuk dan melakukan pembebasan lahan.

Bupati mengeluarkan izin kepada PT Madu Baru untuk mendirikan pabrik di atas tanah warga, tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat. Juga ditetapkan ganti rugi secara sepihak sebesar Rp. 10,-/m persegi.

>> 1978-1979
Masyarakat mulai menolak rencana proyek. Lalu muncul isu untuk memperlemah perlawanan, bahwa tanah mereka tidak diambil tetapi hanya dikontrak selama 25 tahun.

>> Mei 1978
Aparat mulai mengintimidasi warga dengan pemukulan, penyiksaan, dan teror.

>> 5 November 1978
Lewa Dg Rowa ditemukan tewas tergantung di sebuah sumur.

>> 2 Juli 1979
Puluhan petani mendatangi DPRD Sulse mengadukan perampasan tanah dan tindakan kekerasan

>> 1980
Sosialisasi tentang kontrak tanah dilakukan di masjid yang hanya dihadiri oleh beberapa orang saja.

>> 1980
PT. Madu Baru mundur dari proyek, digantikan oleh PTPN XXV. Hak Guna Usaha diterbitkan secara sepihak untuk masa 25 tahun.

>> 1982
Pembebasan lahan secara paksa dan manipulatif dimulai.

>> 1996
Perubahan status dan nama PTPN XXIV-XXV ke PTPN XIV.

>> 1998
Pemerintahan fasis jatuh, kondisi ini membakar kembali semangat perlawanan petani.

>> 1999
Aksi reclaiming tanah mulai dilakukan secara perorangan dan sporadis.

>> 2000
Aksi reclaiming pertama secara kolektif. warga Paccelakkang dengan membangun tenda-tenda diatas lahan eks tebu dan mengganti tanaman tebu derngan palawija seperti Ubi kayu, Ubi jalar dan lain-lain.

>> 2004
Masa HGU habis, sesuai yang tertulis dalam dokumen tersebut.

>> 2005
Warga kampung Lantang mengambilalih 100 ha lahan dengan menanaminya jagung hibrida

>> 2007
Reclaiming makin meluas dan dilakukan secara massal hampir di seluruh desa di Kec. Polongbangkeng. Sejumlah aksi langsung yang sangat signifikan mengambil kembali tanah pertanian. Pembakaran lahan, pendudukan dan pematokan areal perkebunan, pengalihan fungsi lahan menjadi menjadi persawahan, ternak dilepaskan di perkebunan tebu, serta penggagalan pembibitan lahan tebu.

>> 29 September 2008
Ibrahim Rewa, Bupati Takalar menerbitkan sertifikat HGU No 1 PG Takalar seluas 4.562,95 Ha berlaku sampai 2024. Lagi-lagi secara sepihak, padahal telah lewat 4 tahun.

>> 7 Oktober 2008
Warga melakukan aksi pembakaran Blok D Peta 30, yang mengakibatkan pembibitan di blok tersebut gagal.

>> 10 Oktober 2008
Insiden Pakkawa. Brimob menembaki warga yang sedang mengembalakan ternak. 4 orang korban, dan lainnya luka-luka.

>> 15 Juli 2009
Aksi protes warga atas pengolahan PTPN XIV. Mereka menghadang traktor dan karyawan. Sempat terjadi bentrok.

>> 9 Agustus 2009
Terjadi aksi protes petani mencegah PTPN XIV mengolah lahan mereka. Aksi ini direspon secara brutal oleh polisi dari Polresta Takalar + 2 SSK Brimob dan PHH. 8 orang ditangkap, satu ditembak dari jarak dekat, sebagian besar mengalami luka-luka. Dari kejadian tersebut 7 petani ditangkap.

>> September 2009 - ?
Penggeledahan, penjemputan paksa, interogasi, pengintaian, intimidasi dan teror, serta penangkapan demi penangkapan terus dialami warga hingga kronik ini disusun.

REPORTASE KEBANGKITAN PETANI POLONGBANGKENG, TAKALAR

RENTANGAN PERJUANGAN SELAMA 27 TAHUN



Di Polongbangkeng Utara dan Selatan, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, sekitar 50 km dari Makassar. Selama lebih dari 27 tahun tanah petani dirampas untuk dijadikan ditanami tebu oleh Pabrik Gula PTPN XIV (persero).

Awal Mula Perampasan

Dibentuk berdasarkan PP No. 19/1996, PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) adalah satu dari sekian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang agribisnis. PTPN XIV merupakan penggabungan kebun-kebun proyek pengembangan PTP di Sulawesi, Maluku dan NTT yaitu eks PTP VII, PTP XXVIII , PTP XXXII dan PT Bina Mulia Ternak (BMT). PTPN XIV memiliki 18 unit perkebunan dan 25 unit pabrik pengolahan dengan komoditi kelapa sawit, gula , karet, kakao, kelapa hibrida, kelapa Nias, pala, kopi pada areal konsesi seluas 55.425,25 ha.

Khusus komoditi gula PTPN XIV kini mengelola tiga pabrik gula yaitu PG Camming dan PG Arasoe di Kabupaten Bone dan PG Takalar di Kabupaten Takalar dengan total areal seluas 14.312 ha. Dalam setahun, ketiga pabrik ini memproduksi 36.000 ton atau memasok 1,33 % konsumsi gula nasional yang mencapai 2, 7 juta ton.

PG Takalar PTPN XIV beroperasi di Polong-bangkeng sejak tahun 1982. Sebelumnya beroperasi dengan nama PTP XXIV-XXV. PG Takalar PTPN XIV adalah peralihan dari PT Madu Baru, yaitu sebuah perusahaan pabrik gula milik Sultan Hamengkubuwono yang sebelumnya telah berdiri dan membebaskan sebagian tanah petani sejak tahun 1978. Namun pada tahun 1980 PT Madu Baru mundur dari rencana pengolahan perkebunan tebu setelah terjerat kasus penyelewengan dana pembebasan tanah, sehingga digantikan oleh PTPN XIV berdasarkan SK Bupati Takalar tahun 1980.

Penolakan yang dijawab dengan Represi kejam

Reaksi petani atas pembangunan pabrik telah menunjukkan penolakan sejak PT Madu Baru berdiri. Tidak adanya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat oleh dikeluarkannya izin sepihak pembangunan pabrik serta penetapan ganti rugi yang sangat tak sebanding yaitu Rp. 10/m2, adalah alasan penolakan petani. Bahkan pembebasan lahan berjalan penuh dengan manipulasi dan intimidasi. Serangkaian ancaman dan tindakan kekejaman dilakukan aparat TNI. Pengrusakan dan pengambilan tanah secara paksa, pemukulan, penangkapan atas tuduhan kriminal, penembakan, bahkan pembunuhan. Sebagai contoh, pada November 1978 Lewa Dg. Rowa seorang petani ditemukan tewas dengan kaki tergantung, kasusnya tak pernah diusut hingga hari ini.

Setelah peralihan PT Madu Baru kepada PTPN XIV, intimidasi masih terus berlanjut untuk mempercepat penguasaan lahan petani. Bahkan diperparah dengan mencap warga yang menolak pembebasan lahan sebagai PKI. Adalah makar bagi setiap tindakan yang tak sejalan atas kebijakan pemerintah. Ini adalah pola standar di masa itu yang digunakan negara untuk mematahkan perlawanan.

“Karaeng” atau golongan keturunan bangsawan turut berperan dalam upaya pembebasan lahan. Di tengah masyarakat, kelompok ini memiliki posisi dan wewenang lebih tinggi bahkan menempati jabatan dalam struktur pemerintahan. Selain informan, mereka juga mengelabui dan merepresi setiap bentuk penolakan petani.

Atas SK Bupati Takalar tahun 1980, izin HGU diterbitkan selama 25 tahun bagi beroperasinya Pabrik gula PTPN XIV. Ditipu oleh status tanah dan jani bahwa tanah petani akan kembali setelah masa HGU berakhir membuat warga terpaksa menandatangi perjanjian dan menerima pembayaran ganti rugi atas tanah. Ditambah posisi warga yang tersudutkan oleh intimidasi. Meski begitu, sejumlah petani tak sedikitpun pernah mendapatkan ganti rugi.

Lebih dari 6500 m^2 lahan dikuasai pabrik gula PTPN XIV, 4000 m^2 lahan tersebar di 12 Desa di dua kecamatan yaitu Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar. 2500 m^2 lahan tersebar di Gowa dan Jeneponto. Penguasaan lahan secara besar-besaran oleh korporasi negara ini adalah penghilangan sumber kehidupan petani.

Kebangkitan Petani

Penantian selama bertahun-tahun tak mampu membendung keterpurukan dan kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Perlawanan petani merebut kembali tanahnya akhirnya mulai dilakukan.

Tahun 1999, pendudukan lahan bermula, secara individu petani mulai melakukan aksi langsung pengambilan tanahnya. Menduduki lahan, mengolah dan mengganti tebu dengan tanaman yang lebih produktif (ubi kayu, jagung, palawija) terjadi di beberapa areal perkebunan .

Tahun 2005, status HGU PTPN XIV seharusnya berakhir tetapi PTPN XIV terus melakukan aktivitasnya seolah-olah HGU tak punya batas waktu. Petani pun terus melakukan pengambilalihan lahan, petani di desa lainnya juga melakukan hal sama. Reclaiming meluas, diperkuat keyakinan bahwa status tanah telah kembali karena masa HGU telah berakhir.

Tahun 2007, dua tahun lewat dari batas HGU, tetap tak ada kejelasan atas pengembalian tanah petani. Reclaiming makin meluas dan dilakukan secara massal hampir di seluruh desa di Kec. Polongbangkeng. Pembakaran lahan, pendudukan dan pematokan areal perkebunan, pengalihan fungsi lahan menjadi menjadi persawahan, ternak dilepaskan di perkebunan tebu, serta penggagalan pembibitan lahan tebu adalah sejumlah aksi langsung yang sangat signifikan mengambil kembali tanah pertanian.

Tahun 2008. akibat aksi reclaiming petani ini telah mengancam aktivitas PTPN XIV, sehingga satuan Brimob terus diturunkan melakukan penjagaan di sekitar lokasi. Warga menjalankan taktik jenius, melepaskan ternak sapi mereka ke areal perkebunan tebu. Ini dimaksudkan sebagai upaya merebut kembali tanah tersebut, sekaligus mensabotase tanaman illegal yang ditanam PTPN di tanah mereka. Brimob yang terlatih tersebut terus disiagakan menghalau aksi petani. Dalam sebuah aksi protes, petani dihadang oleh pasukan bersenjata lengkap. Insiden penembakan pun meletus. Insiden ini melukai 4 orang petani. Konflik petani dan PTPN XIV kembali terangkat dan menjadi sorotan. Resistensi warga semakin meningkat apalagi setelah Bupati Takalar secara sepihak kembali menerbitkan sertifikat HGU PG Takalar berlaku sampai 2024.

Tahun 2009, sepanjang tahun dan hampir setiap harinya, petani Polongbangkeng mempertahankan lahan mereka. Sepanjang itu pula mereka mendapatkan tekanan aparat yang terus disiagakan PTPN XIV. Penembakan kembali terjadi hanya dalam kurun waktu tidak sampai setahun. Pada 9 agustus 2009, sebuah aksi protes yang dimaksudkan petani untuk mencegah traktor milik PTPN XIV mengolah lahan mereka, dihalau secara brutal oleh aparat Negara. Satuan polisi dari Polresta Takalar, bersama 2 SSK Brimob dan PHH membabi buta melemparkan gas air mata dan tembakan pada kerumunan petani yang berkumpul. Setidaknya 8 orang petani tertembak, satu di antaranya mengalami luka serius di kepala karena ditembak dari jarak dekat, sementara sebagian besar lainnya juga mengalami luka-luka. Dari kejadian tersebut 7 petani ditangkap di lokasi kejadian.

Pasca kejadian ini, polisi terus melakukan penyisiran dan intimidasi ke rumah-rumah warga. Intimidasi lewat jalur hukum, mengkriminalkan petani, berbagai taktik digunakan PTPN XIV dalam memperlemah perjuangan Petani.

Upaya-upaya melemahkan Perjuangan Petani

Terdesak dengan aksi petani yang tak kunjung mereda, dimana mengancam kegagalan obsesi swasembada gula yang diprogramkan, akhirnya membuat pemerintah, PTPN dan polisi mendorong upaya diplomasi dan pendekatan kepada sejumlah warga secara terbatas. Wakil Gubernur Agus Arifin Numang turun langsung ke Takalar untuk bertemu dengan petani. Tetapi ini sekali lagi tak melibatkan petani secara keseluruhan, dan pada akhirnya ber-buah solusi sepihak yang tidak didukung oleh sebagian besar petani.

Keputusan pertemuan yakni Program Tebu Rakyat (TR) tak ubahnya sebagai sogokan agar petani melupakan siapa sebenarnya pemilik tanah dan siapa yang merampoknya. Mereka dijanjikan sekian luasan tanah untuk digarap dengan status hak kelola perkebunan tebu. Bukannya mengembalikan tanah petani, corak kapitalistik yang kental dalam program tersebut menjadikan petani hanya dijadikan buruh untuk menyuplai bahan baku produksi. Sebuah pembodohan dan manipulasi sejarah tanah, yang untungnya tidak disepakati oleh mayoritas petani.

Adu domba dan politik pecah belah terus dilancarkan, yang menyulut konflik horizontal akibat dominasi beberapa elit-elit masyarakat yang tergabung dalam sebuah tim perwakilan dari seluruh desa, justru beralih menjadi musuh yang mengambil keuntungan dalam program tersebut.

Di bulan Agustus 2009, diplomasi kembali digagas. Kali ini giliran polisi yang maju. Kapolda Sulselbar Mathius Salempang yang langsung turun tangan. Tapi, seperti sejarah selalu mengajarkan, diplomasi takkan pernah memenangkan kaum yang ditindas. Perjuangan petani kini dibelokkan dengan cara mendudukkan mereka pada hukum formal, sebuah tempat yang tidak pernah menyediakan tempat bersahabat bagi petani.

Epilog

Keberadaan Pabrik Gula PTPN XIV hampir 30 tahun telah secara drastis mengubah kehidupan petani Polongbangkeng. Akan tetapi, saat mereka menjadi tumbal atas ambisi tak kenal batas, petani Polongbangkeng telah memahami siapa musuh mereka dan bagaimana sistem ini berjalan. Mereka mengajarkan bagaimana berjuang dengan sepenuh hati. Mereka menunjukkan bahwa hanya dengan 'aksi langsung', dan bukan berunding atau memohon belas kasihan pejabat, kehidupan mereka bisa berubah. Mereka membuktikannya saat menduduki lahan-lahan secara sepihak, menanaminya langsung, panen padi dan jagung dirasakan kembali setelah hilang selama 27 tahun.

Dalam situasi terakhir, petani terus dihantui teror negara terkait kriminalisasi karena menuntut hak. Penggrebegan, intimidasi, pengawasan, penjemputan paksa, interogasi, penahanan, dan tindakan lainnya terus menerus dilancarkan. Ini adalah upaya sistematis untuk melihat perjuangan petani hancur lebur. Tetapi kita semua tahu, mereka tak mungkin bertahan hingga hampir 30 tahun di bawah tindakan-tindakan dan intimidasi kejam jika tak ada semangat hidup yang terus menyala di dada mereka. Semangat hidup yang berarti bersiap untuk mati, sebagaimana yang mereka sering serukan!



TABIR GILA DUNIA GULA

ANALISA MENGENAI INDUSTRI GULA & PERAMPASAN TANAH PETANI POLONGBANGKENG, TAKALAR

Dalam sebuah tatanan yang diorganisir berdasarkan relasi kapital, peristiwa demi peristiwa yang serupa dengan yang terjadi di Polongbangkeng, terjadi tiap detiknya di berbagai tempat. Siapapun yang paham bagaimana kapital bekerja niscaya akan melihat bagaimana ia beroperasi hanya dengan cara yang memungkinkannya eksis : mengeksploitasi!

Seseorang yang meragukan bahwa kejadian ini memiliki relasi kuat dengan konstruksi ekonomi dan konfigurasi mutakhir kapitalisme, mesti memeriksa kembali kejadian yang telah dan tengah berlangsung secara menyeluruh. Apa yang terjadi di Polongbangkeng, Takalar bukanlah sebuah kejadian begitu saja tanpa rentangan picu dan konstruksi historis. Ia merepresentasikan bagaimana konflik kelas terorganisir dari skala global hingga lokal, dari zaman kolonial hingga era *forex*. Tulisan ini menganalisa bagaimana kecenderungan produksi dan konsumsi dalam dunia komoditas mengkreasikan malapetaka.

Lansekap Bisnis Gula Dunia

“Meskipun berada dalam harga relatif tinggi, permintaan gula saat ini masih sekitar 70%. Tidak banyak hal dalam hidup yang berada dalam 70%. Gula memiliki masa depan luar biasa” [Jim Rogers - Rogers Holding]

Harga gula dunia saat ini yang mencuat hingga 88 % berada dalam posisi tertingginya dalam 28 tahun terakhir. Laporan Food Outlook FAO 2009 menyebutkan bahwa pergerakan harga dalam setahun menunjukkan trend meningkat. Meskipun begitu, analis pasar menyatakan ini sesungguhnya adalah posisi stagnan. Pasar gula dunia masih dihantui titik kritis, demikian kesimpulan stasiun televisi Bloomberg.

Kisaran tersebut diklaim sebagai posisi yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Itulah mengapa pelaku bisnis gula masih yakin bahwa bisnis gula masih manis dan menggiurkan.

Saat ini produksi gula dunia mencapai 158, 5 juta ton, menurun cukup tajam hingga 5,4 %. Sementara tingkat konsumsi cenderung stabil pada perkiraan 162,2 juta ton. Selisihnya cukup signifikan untuk mengganggu harga pasaran, mencapai 3 4,7 juta ton. Mengapa produksi gula dunia menurun?

Ada dua hal yang menyebabkannya. Pertama, rusaknya lahan tebu dan terjadinya gagal panen di beberapa produsen gula utama seperti Brazil dan India. Perubahan iklim telah mengganggu fase tanam dan hujan. Akibatnya, petani lebih memilih menanam tanaman lain yang lebih menguntungkan ketimbang tebu yang sangat beresiko untuk saat ini. Dengan begitu mengurangi produksi gula akibat menurunnya suplai bahan baku. Tentu saja hal ini mempengaruhi industri gula. Sebagai gambaran, India yang dulunya produsen terbesar kedua kini mesti mengimpor 6 juta ton untuk menutupi penurunan produksi domestik 41%.

Penyebab kedua, industri gula tidak lagi diolah hanya menjadi gula dalam bentuk tradisional (kristal/hablur). Dalam dua dekade terakhir, terdapat berbagai komoditi diciptakan dari industri berbasis tebu. Namun dari semua jenis tersebut ada dua komoditi yang menjadi trend industri dan signifikan mempengaruhi produksi dan stok gula dunia. Yakni diolah untuk dijadikan gula rafinasi, gula untuk industri makanan dan minuman kemasan, dan diolah untuk dijadikan etanol sebagai bahan bakar nabati. Sebagai gambaran situasi tersebut, Brazil produsen gula utama di dunia telah mengkonversi industri gulanya ke etanol sampai 30%. Seiring semakin besarnya transformasi ke produksi etanol, harga gula di pasar global menurut perkiraan pengamat akan terus melonjak hingga 2014.

Defisit produksi ini telah menyebabkan ketidakstabilan harga. Jelas ini adalah konsekuensi logis bilamana tata produksi, distribusi dan konsumsi didikte berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Tetapi bagi kapital, selama permintaan masih tinggi, defisit produksi juga bermakna peluang besar. Artinya, yang harus dilakukan adalah menambah kapasitas produksi yang bisa menutupi pasar gula yang sebelumnya bolong karena dialihkan ke komoditi baru.

Gula di bawah Indonesia Inc.

"*Biarkan harga gula mengikuti mekanisme pasar, lagi pula tidak ada keluhan dari konsumen*", [Menteri Pertanian Anton Apriantono]

Industri gula adalah avant garde bagi industri Indonesia. Ia pernah menjadi penyokong utama ekonomi kolonial, bahkan mengkontribusikan 56,8 % pendapatan nasional penjajah di Eropa sana. Meskipun dikatakan bahwa produksi gula Indonesia telah mundur dari beberapa dekade lampau, namun pada dasarnya situasinya hari ini relatif sama. Konsumen Indonesia masih merupakan potensi pasar yang melimpah dan menggiurkan, serta petani tebu masih menjadi pekerja yang produktif memasok kemakmuran pemilik industri gula.

Bisnis gula di Indonesia dikuasai oleh Samurai, segelintir pengusaha kunci yang memiliki posisi kunci dalam industri gula. Diantaranya adalah PT Arthaguna Sentosa, PT Kencana Gula Manis, Grup Haryanto, Grup Berlian Penta, dan PT Citra Gemini Mulia. Para samurai inilah yang memonopoli lalu lintas pasar gula di Indonesia.

Di tahun 2002 akibat tekanan IMF, liberalisasi gula tahap pertama diteken lewat SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Tata Niaga Gula. Pembukaan pasar besar-besaran ini mendorong pembentukan pasar yang lebih terdikte oleh para korporat karena mencakup juga standarisasi dan spesifikasi gula yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Dekade inilah dimana produksi dan konsumsi gula semakin kuat didorong berorientasi industri, yakni industri yang ditopang oleh gula rafinasi seperi makanan dan minuman kemasan.

Kita dapat melihat dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan industri makanan dan minuman kemasan melesat. Insting pasar korporat telah mengendus hal ini sebagai potensi bisnis besar, disertai berbagai kemudahan investasi yang diberikan pemerintah, maka industri gula rafinasi dibangun untuk merespon industri makanan dan minuman. Dikuatkan status transnasional industri makanan dan minuman tersebut, para korporat dapat mendikte dari mana bahan baku yang mereka inginkan, dan diolah untuk apa bahan baku tersebut.

Dampaknya, tata niaga tersebut telah mendorong petani tebu di Indonesia terjebak masuk dalam skema industrialisasi global yang mendorong penciptaan komoditi-komoditi baru. Dimana petani tebu menjadi pekerja yang bertugas menyuplai bahan baku ke pabrik gula, yang sebagian besar adalah pabrik gula BUMN/milik negara, yang selanjutnya berdasarkan skema revitalisasi pergulaan nasional, akan memasok bahan baku ke industri-industri komoditi berbasis gula. Gambarannya, tahun 2009 ini setidaknya ada tiga pabrik baru gula rafinasi dibangun sebagai respon meningkatnya industri makanan minuman, yang diharapkan dapat menutupi kebutuhan industri sebesar 1,3 juta ton gula rafinasi.

Dengan begitu, Indonesia memang menggiurkan. Dengan kapasitas produksi dalam negeri sebesar 2,9 juta ton dan konsumsi gula nasional mencapai 3,8 juta ton, ini adalah daging segar bagi serigala-serigala buas yang lapar kapitalis domestik dan internasional.

Situasi Lokal

“*Tahun 2010 Sulsel akan swasembada gula. Sulsel akan menjadi pemimpin pasar KTI*“ [Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulsel]

Telah dipaparkan bagaimana industri gula dunia sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia berkat potensinya dalam menyerap komoditi sekaligus menyuplai bahan baku. Defisit stok global, harga dan situasi gula di tingkat nasional telah memicu borjuasi lokal di Sulawesi Selatan untuk lebih agresif dalam persaingan di sektor ini. Ini merupakan insting dasar para korporat bersama administrasinya dalam melayani kepentingan pasar. Bagi mereka, apa yang terhampar di hadapan mereka adalah potensi yang mesti direspon dengan agresif.

Merasa sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia, administrasi propinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh kapitalis lokal jelas merasa sangat berkepentingan dengan potensi pasar di kawasan ini. Sebagai manifestasinya, program swasembada gula tahun 2010 diluncurkan menjadi trigger untuk menguasai pasar gula domestik.

Didorong argumentasi bahwa kebutuhan gula nasional sebesar 2,7 juta ton, yang mana dari kebutuhan tersebut hanya mampu dipenuhi 30-40%. Stok gula yang terbatas menjadi kendala pemenuhan swasembada gula. Hal ini dipengaruhi oleh produsen gula terbesar yang dimiliki Sulawesi Selatan yakni PTPN XIV, yang memiliki 3 pabrik gula yakni PG Arosoe, PG Camming, dan PG Takalar, yang hanya mampu menyuplai 36.000 ton. Kekurangan ini ditutupi dari pasokan baik dari luar Indonesia (Taiwan, Thailand, dan Vietnam), maupun dari penghasil gula di Jawa dan Lampung.

Kawasan timur adalah pasar potensial. Dengan penduduk hingga 22 juta dan tingkat kebutuhan gula 259 ribu ton, serta kekurangan pasokan yang mencapai 148 ribu ton, kawasan ini sangat menjanjikan. Dari 60 PG yang ada di Indonesia, hanya empat PG yang berada di wilayah timur Indonesia, yaitu tiga di Sulawesi Selatan dan satu di Gorontalo. Sementara itu, dari delapan pabrik gula rafinasi, hanya satu yang terdapat di kawasan ini.

Akan tetapi, para borjuasi lokal tidak dapat serta merta menguasai pasar ini. Mereka harus bersaing dengan borjuasi nasional yang memiliki Lampung dan Jawa, sebagai produsen utama gula Indonesia. Belum lagi borjuasi internasional, yang memasok gula impor ke pasar domestik. Singkatnya, untuk memperebutkan KTI, ada sebuah persaingan yang diatur oleh negara sebagai mediator pasar.

Pilar proyek yang diandalkan untuk ambisi surplus gula Pemprov Sulsel adalah PT. Perkebunan Nusantara XIV, BUMN yang mengendalikan dan mensupervisi tiga pabrik gula di Sulawesi Selatan tersebut. Namun, ketiga pabrik tersebut sangat rapuh untuk diandalkan mendominasi pasar KTI. Persoalannya klasik: selain lahan yang telah terbatas, mesin-mesin yang ada sudah sangat tua dan hanya mampu berproduksi di bawah target normal. Beberapa tahun silam bahkan para pengusaha gula lokal mendesak agar Pabrik Gula yang ada dibawah PTPN XIV diprivatisasi, untuk mendongkrak efisiensi dan produktifitasnya.

Namun masalahnya tidak sampai disitu, tebu yang dimiliki PTPN XIV telah sampai pada generasi ketujuh. Usia yang tidak efektif lagi dalam menghasilkan tebu dengan rendeman (kadar gula) normal. Belum lagi liberalisasi pertanian, dimana kapitalis Indonesia mesti bersaing dengan komoditi dari luar Indonesia yang berbiaya produksi rendah dengan tarif masuk yang hampir nihil.

Tahun 2009, PT. Makassar Te'ne sebuah pabrik gula rafinasi dibangun untuk mengiringi industri makanan dan minuman yang marak membuka pabrik di kawasan ini. Guna kepentingan pasar, Pemprov Sulsel memfasilitasi PT. Makassar Te'ne bersinergi dengan PTPN XIV agar keduanya berbagi pasar. PTPN XIV memasok gula mentah dan PT. Makassar Te'ne mengolahnya menjadi gula rafinasi, untuk disuplai ke industri.

Karena kondisi yang ada dinilai menyulitkan untuk mencapai target ambisius swasembada gula di tahun 2010, maka dilakukanlah langkah-langkah strategis. Pertama-tama, melakukan revitalisasi dan peremajaan pabrik gula. Kredit 400 milyar dari BRI dikucurkan ke PTPN XIV untuk mendorong efisiensi dan percepatan kapasitas produksi. Mesin-mesin dan komponen produksi lainnya diganti dan diperbaiki. Tanaman tebu diperbaharui untuk mengejar panen. Tetapi justru disinilah kendalanya, lahan yang ada tidak mencukupi bila dibandingkan dengan target produksi.

Sambil mengupayakan perluasan lahan baru, alternatif paling efisien dan memungkinkan bagi PTPN dan pemprov adalah mempertahankan lahan lama. Lahan yang dulunya diambil secara paksa dari warga, lantas diberi status Hak Guna Usaha.

Hal inilah yang menjelaskan mengapa di tahun 2007, HGU tak kunjung usai dan tanah tak kunjung dikembalikan. Malah PTPN XIV memperpanjang secara sepihak HGU di area pengelolaan PG Takalar. Ini adalah logika paling purba dari praktek-praktek kapital.

Oto-Kritik Tanpa Titik Balik

Sejak meletusnya aksi protes petani yang dihadang dengan meletusnya pula senapan Brimob, begitu banyak komentar yang mengarah pada aksi-aksi langsung yang dilakukan petani maupun permasalahan pergulaan nasional. Akan tetapi, kejadian ini gagal dianalisa sebagai sirene akan kegilaan industri.

Kapital telah men-direct pola konsumsi massal yang berujung pada malapetaka. Bagi mereka, kebutuhan manusia dapat selalu didiversifikasikan dengan menamakannya peluang ekonomi. Ini jelas bukan lelucon yang lucu, jika melihat bagaimana lahan-lahan produktif bagi sumber pangan kini dikonversi menjadi areal untuk tanaman yang akan diolah menjadi bahan bakar nabati atau bahan baku industri yang tidak dibutuhkan manusia dan alam. Para korporat bersorak atas inovasi bahan bakar alternatif semenjak krisis energi menghantui kapitalisme. Tetapi semua orang harus menanggung akibat dari berkurangnya akses terhadap pangan akibat konversi lahan dan industrialisasi.

Bagi kami, sebuah analisa haruslah sekaligus kritik itu sendiri. Para pemerhati ekonomi-kerakyatan, aktifis petani, aktifis pekerja, aktifis lingkungan hidup, gagal melihat bagaimana kapital beroperasi melampaui logikanya sendiri. Perampasan tanah, penghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan kerusakan lingkungan adalah keniscayaan, sekali lagi, jika ekonomi ditata dalam logika kapital. Dan hal tersebut tidak bisa diselesaikan dengan nasionalisasi, industrialisasi, atau omong kosong swasembada dan ketersediaan stok dalam negeri. Ia tidak bisa dikendalikan dengan memberikan kendali pada segelintir orang bernama pemerintah. Ia tidak bisa dibuat berpihak hanya dengan menaikkan upah. Sebuah kritik permanen harus berangkat dari sebuah titik yang tidak memungkinkannya kembali lagi pada titik tersebut.

Pada akhirnya petani Takalar memang benar! Dengan membakar lahan tebu, merusak traktor, menghadang dan menghalangi proses produksi, mereka telah membuktikan bahwa satu-satunya cara efektif yang bisa menghentikan kegilaan industri dan kapital hanyalah dengan cara yang telah dipakai kelas pekerja sejak awal kemunculan industri : **sabotase!**

